

Jenis-Jenis Audit Sektor Publik



Audit Internal

TITLE HERE



- Dilaksanakan oleh auditor internal yang merupakan bagian dari organisasi.
- Internal audit memiliki tujuan pemeriksaan untuk membantu manajemen dalam menjalankan tugasnya melalui cara memberikan saran dari analisa, penilaian terkait aktivitas yang di audit.
- Pelaksanaan internal audit mengacu pada *Internal Audit Standards* yang ditetapkan oleh *Institute of Internal Auditors* atau Norma Pemeriksaan Intern yang ditetapkan oleh BPKP maupun BPK serta Norma pemeriksaan satuan pengawasan intern BUMN/BUMD oleh SPI (Standar Pemeriksaan Intern belum disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia)
- Berlakunya pemeriksaan internal dilakukan lebih mendetail dan membutuhkan waktu sepanjang tahun. Hal ini disebabkan internal auditor memiliki kesediaan waktu yang lebih untuk perusahaannya.
- Penanggungjawab internal auditor tidak harus sebagai akuntan yang terdaftar.
- Gaji maupun tunjangan yang diperoleh internal auditor diperoleh dari organisasi.
- Internal Auditor tertarik pada kesalahan material dan non-material.



Definisi

- *Internal Auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control, and governance processes. (Sawyer, 2005).*

Audit Eksternal



- Audit eksternal dilaksanakan oleh auditor eksternal yang berasal dari luar organisasi (Kantor Akuntan Publik).
- Tujuan Eksternal audit adalah memberikan masukan terkait kewajaran laporan finansial yang disusun organisasi.
- Isi dari *external audit report* yaitu pendapat tentang kewajaran *financial report*. Selain laporan tersebut juga disertai *management letter* yang berisi tentang kelemahan pengendalian internal dan saran perbaikannya yang akan dilaporkan kepada manajemen perusahaan.
- Standar yang digunakan pada audit eksternal adalah Standar Profesional Akuntan Publik dari Ikatan Akuntan Indonesia.
- Pelaksanaan audit eksternal dilaksanakan dengan sampling dikarenakan waktu yang terbatas. Selain itu biaya pemeriksaan akan jauh lebih besar bila dilaksanakan secara mendetail.
- Sebelum memberikan laporan hasil audit, auditor harus menyertakan “Surat Pernyataan Klien / *Client Representation Letter*”.
- *External Auditor* hanya fokus dan tertarik pada kesalahan material yang berpengaruh terhadap kewajaran laporan finansial perusahaan.



UU NO.5/2004 (SPKN)

Tiga jenis audit organisasi publik:

1) Audit Keuangan, 2) Audit Kinerja, 3) Audit dg Tujuan Tertentu.

1. Audit Keuangan: audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*), apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.



Audit Kinerja

- Untuk menilai tingkat keberhasilan kinerja suatu Kementerian/Lembaga Pemerintah, untuk memastikan sesuai atau tidaknya sasaran kegiatan yang menggunakan anggaran. Oleh karena audit kinerja (*performance audit*) merupakan perluasan dari audit keuangan yang meliputi : ekonomi, efisien dan efektifitas, maka auditor yang akan melaksanakan kegiatan harus memperoleh informasi tentang organisasi, meliputi struktur organisasi, prosedur kerja dan sistem informasi dan pelaporan keuangan dan kegiatan kepada manajemen.
- Ketentuan baru Audit Kinerja: UU No.5/2004 ttg SPKN (Sistem Perbendaharaan Keuangan Negara) , PP No.60/2008 ttg SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), dan UU No.14/2008 ttg KIP (Keterbukaan Informasi Publik).



2 Tipe Audit Kinerja

1. Audit Program (efektivitas)
2. Audit Efisiensi (management & operational audit).



Audit Program

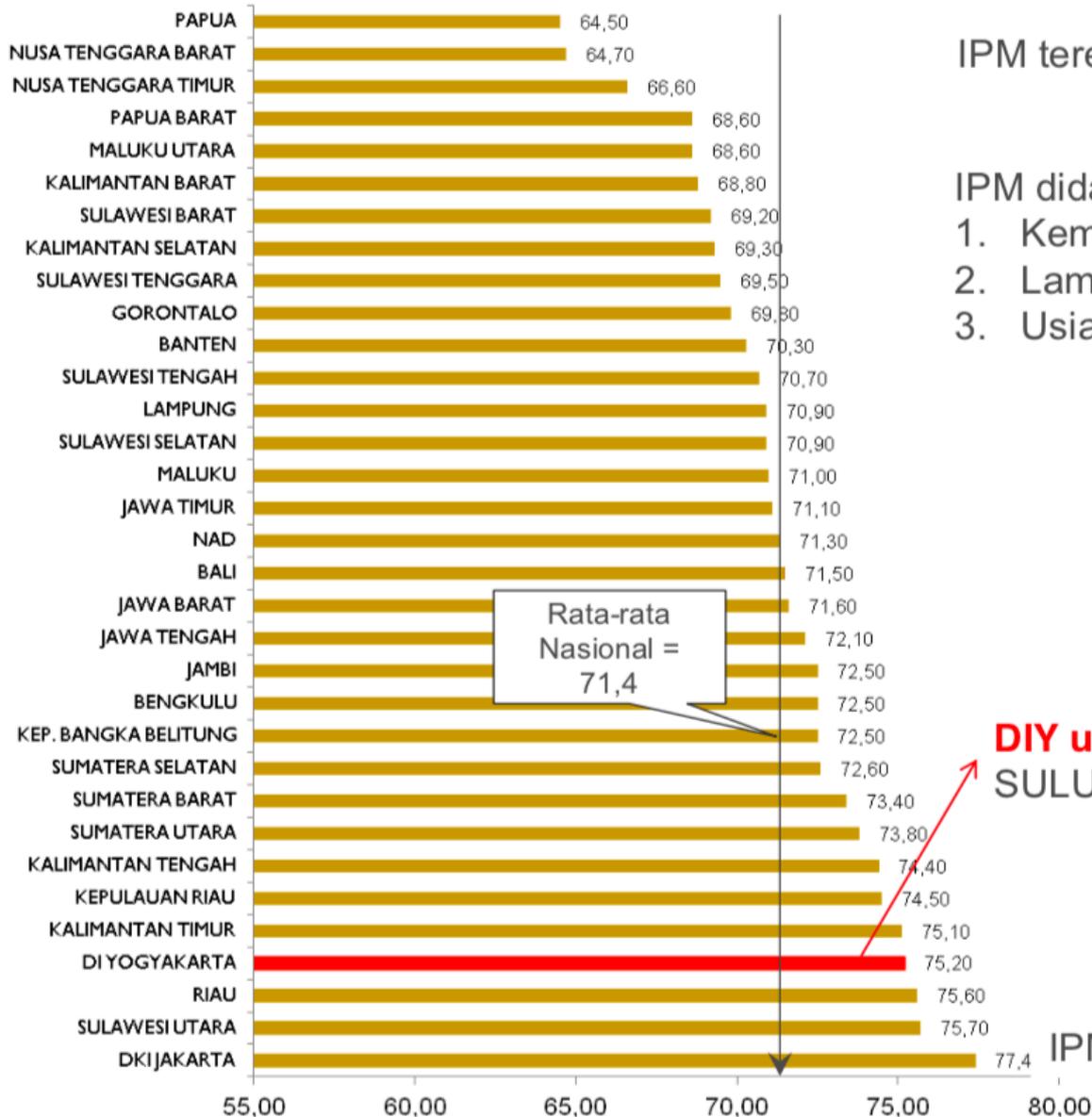
1. Menilai capaian program yang diinginkan atau manfaat yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau badan lain yang berwenang.
2. Efektivitas kegiatan entitas, pelaksanaan program, kegiatan, atau fungsi instansi yang bersangkutan.
3. Tingkat kepatuhan entitas yang diaudit terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatannya.
Contoh pelaksanaan audit program antara lain :
Menilai tujuan program, baik yang baru maupun yang sudah berjalan, untuk menentukan apakah tujuan tersebut sudah memadai dan tepat/relevan
Menentukan tingkat pencapaian hasil program yang diinginkan.
Menilai efektivitas program dan/atau unsur program secara sendiri – sendiri.
4. Mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan kinerja yang baik dan memuaskan
5. Menentukan apakah manajemen telah mempertimbangkan alternatif - alternatif lain untuk melaksanakan program tersebut yang mungkin dapat memberikan hasil yang lebih baik dengan biaya rendah.



Audit Efisiensi

1. Apakah entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya (seperti karyawan, gedung, ruang, dan peralatan kantor) secara hemat dan efisien.
2. Apa yang menjadi penyebab timbulnya pemborosan dan inefisiensi. Apakah entitas tersebut telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penghematan dan efisiensi.
3. Pertanyaan teknis:
 - Pelaksanaan pengadaan yang sehat.
 - Melakukan pengadaan sumber daya (jenis, mutu, dan jumlah) sesuai dengan kebutuhan dan dengan biaya yang wajar
 - Melindungi dan memelihara semua sumber daya negara yang ada secara memadai.
 - Menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau yang kurang jelas tujuannya.
 - Menghindari adanya pengangguran atau jumlah pegawai yang berlebihan.

IPM Tinggi, Kemakmuran Rendah?



IPM terendah/terburuk PAPUA

IPM didasarkan pada 3 faktor:

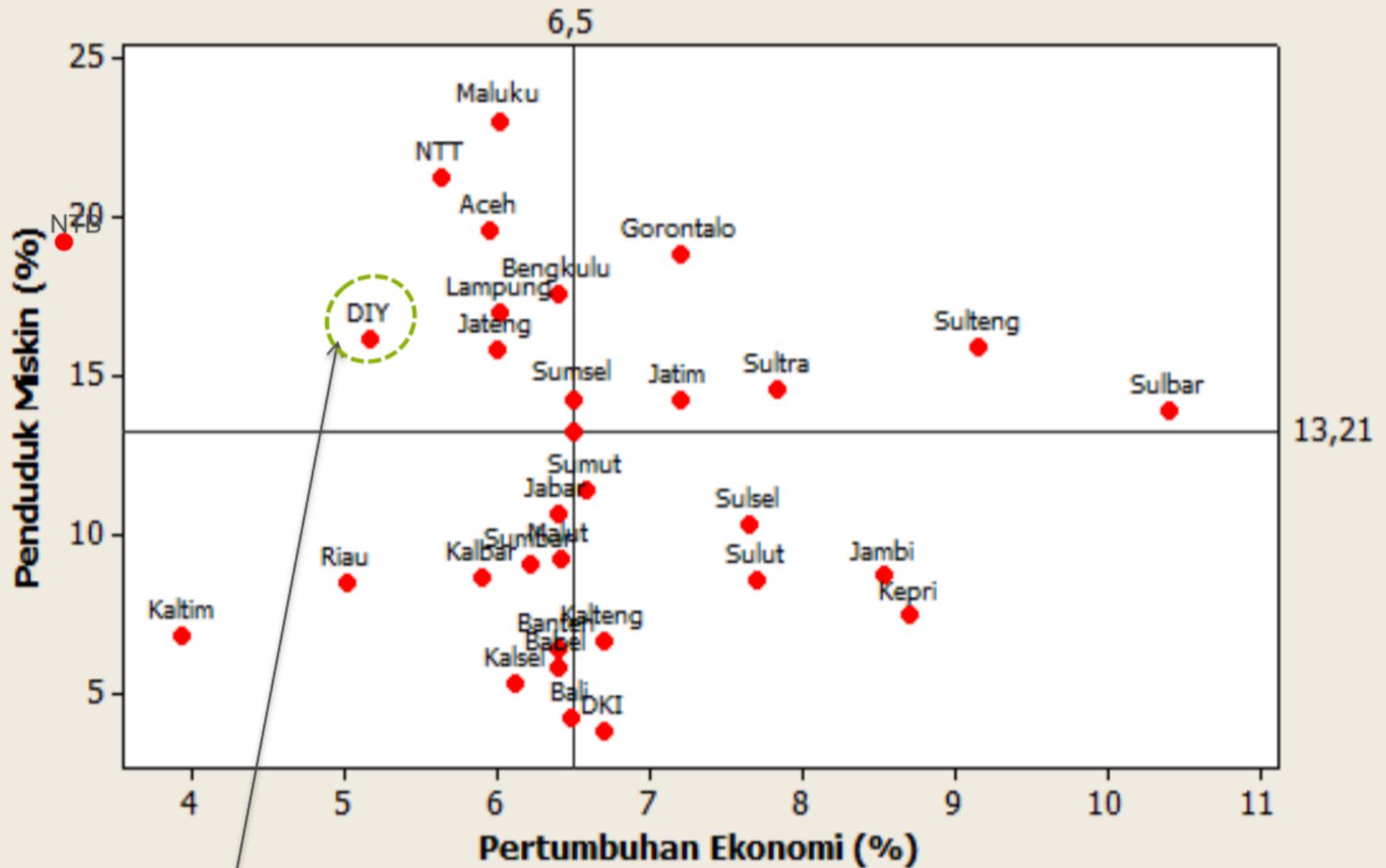
1. Kemampuan daya beli
2. Lama sekolah
3. Usia Harapan Hidup

Rata-rata Nasional = 71,4

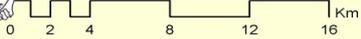
DIY urutan ke 4, setelah DKI, SULUT, dan RIAU

IPM tertinggi/terbaik DKI Jakarta

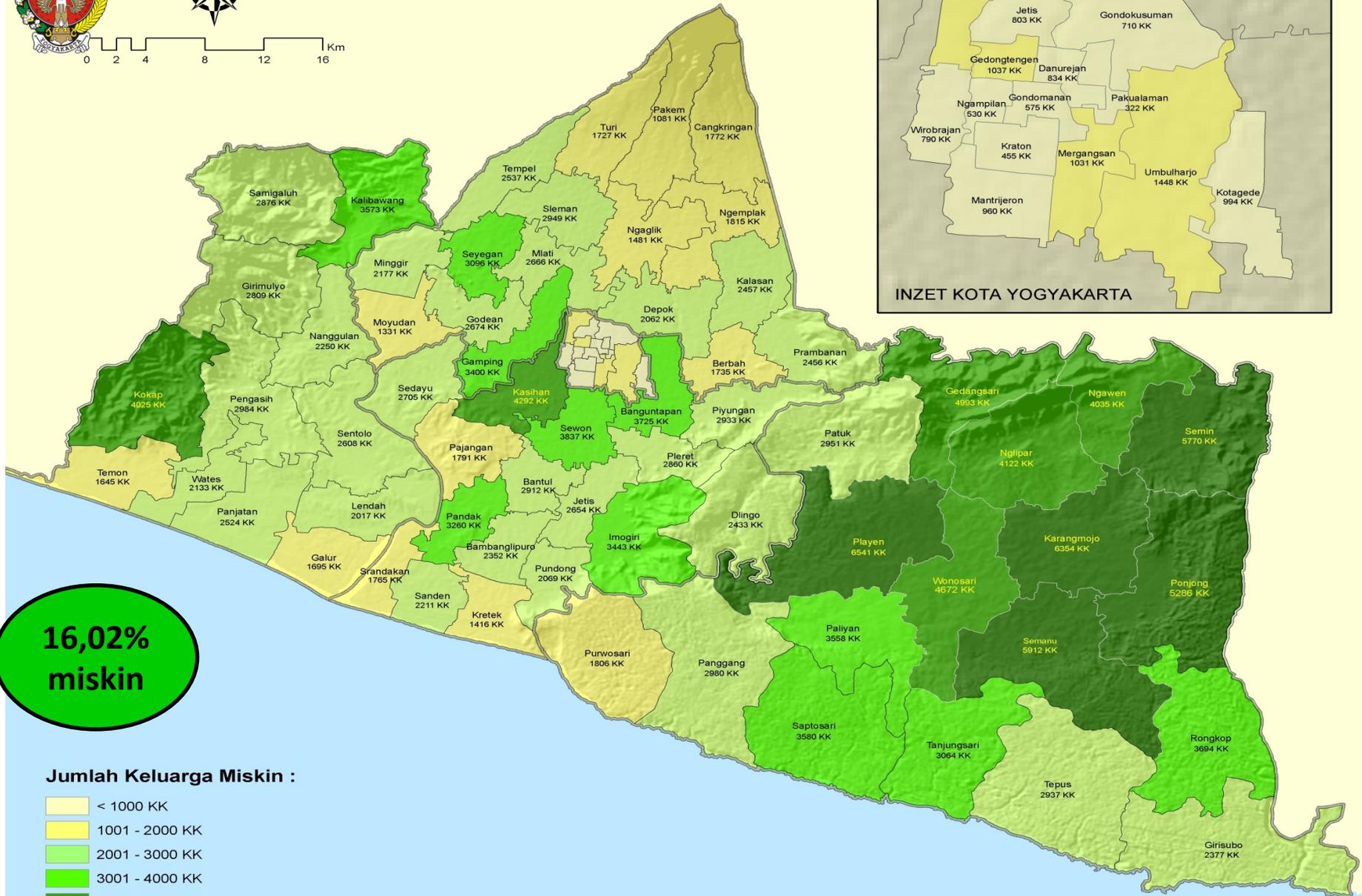
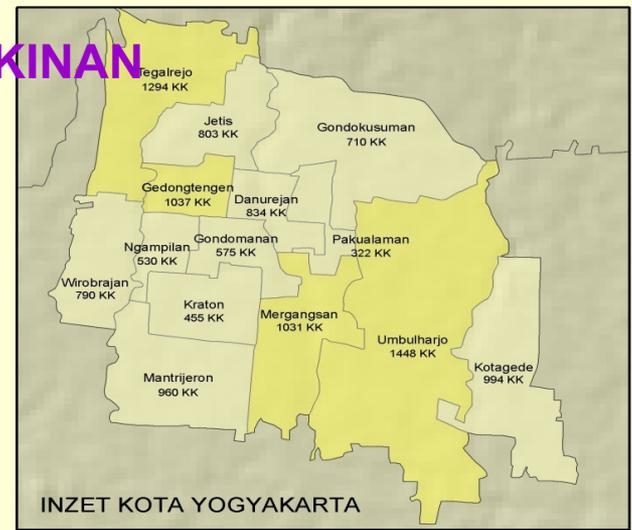
Penduduk Miskin vs Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011



Penduduk miskin DIY tinggi, dan pertumbuhan ekonomi DIY rendah



MASIH BANYAK KANTONG KEMISKINAN



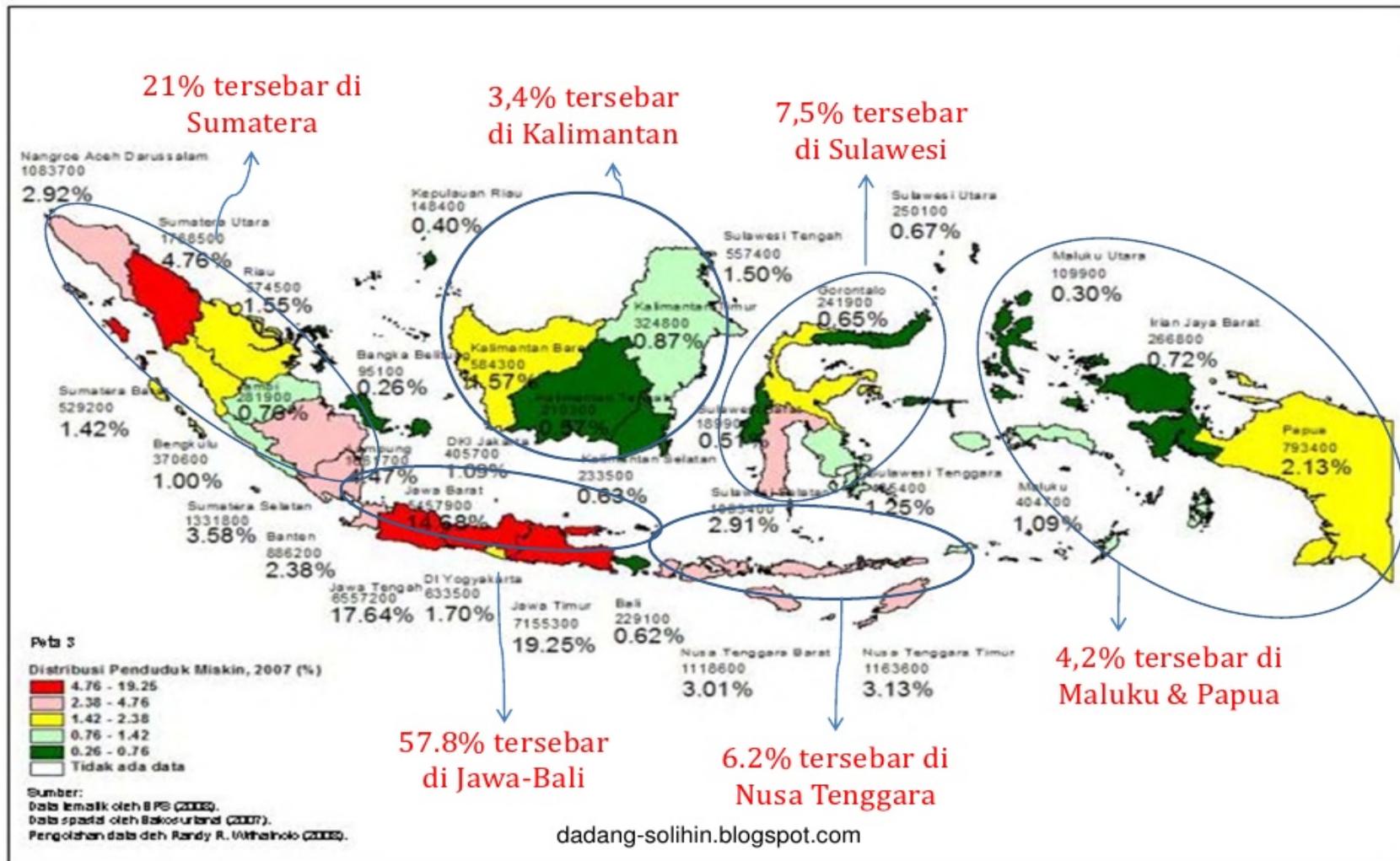
16,02% miskin

Jumlah Keluarga Miskin :

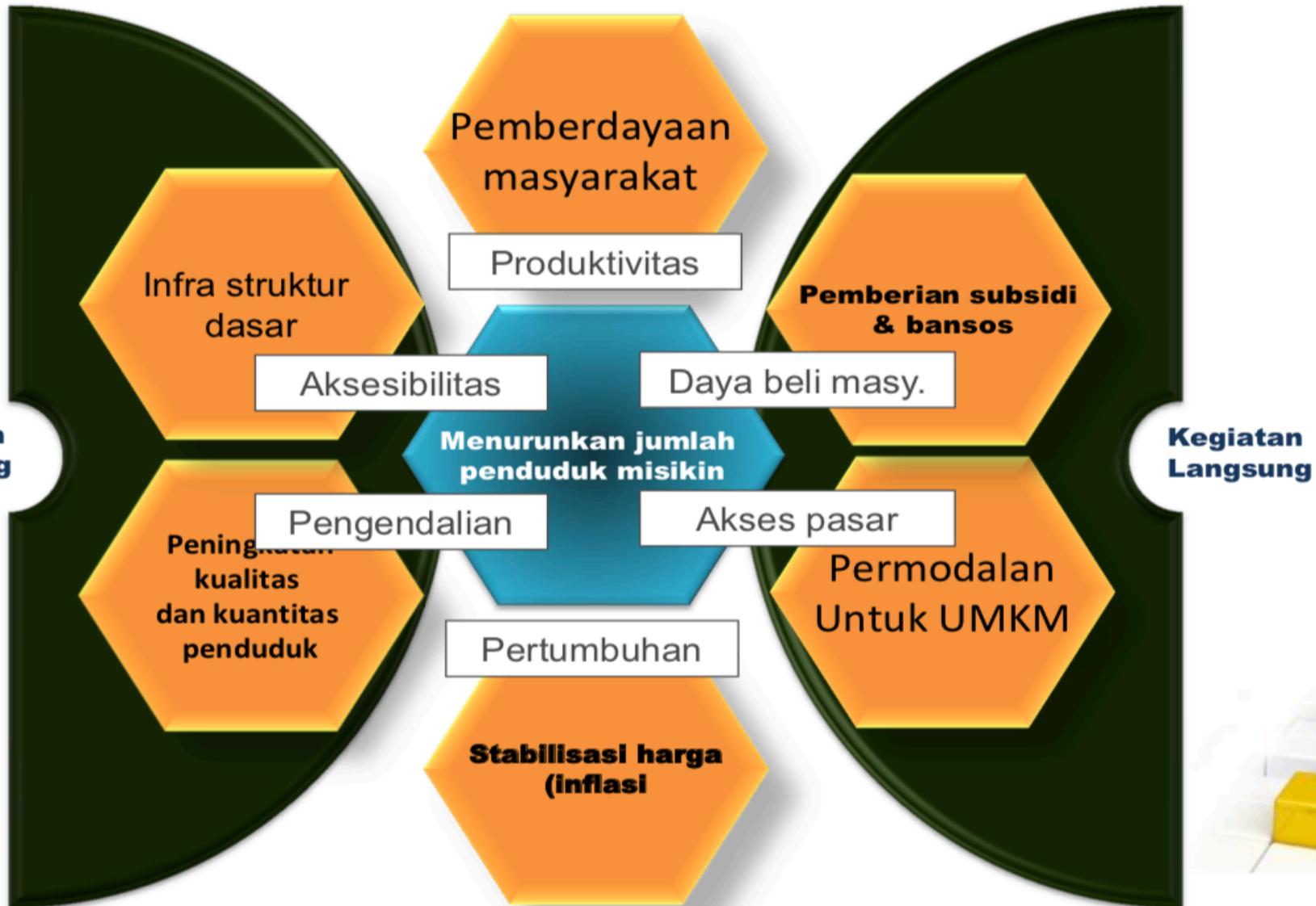
- < 1000 KK
- 1001 - 2000 KK
- 2001 - 3000 KK
- 3001 - 4000 KK
- 4001 - 5000 KK
- > 5000 KK



Penduduk Miskin Tersebar Tidak Merata



Fokus Penanggulangan Kemiskinan



Tabel 1. APBD Prov DI Yogyakarta 2018



Uraian	Jumlah	% Total
	(rupiah)	Belanja APBD
Total Pendapatan	5.182.969.634.012	93,48
Pendapatan Asli Daerah	1.734.005.738.165	31,28
Dana Perimbangan	2.396.221.853.000	43,22
Pajak Daerah	1.525.970.677.535	27,52
Retribusi Daerah	37.471.040.290	0,68
Lain-lain Pendapatan	94.924.534.095	1,71
Total Belanja	5.544.331.777.406	100,00
Belanja Tidak Langsung	2.714.312.157.554	48,96
Belanja pegawai	1.335.096.081.593	24,08
Hibah	641.512.530.000	11,57
Bantuan sosial	850.000.000	0,02
Bantuan keuangan	83.017.072.931	7,00
Belanja tidak terduga	19.735.766.756	5,46
Belanja Langsung	2.830.019.619.852	51,04
Belanja pegawai	243.860.678.985	4,40
Belanja barang & jasa	1.400.423.089.110	25,26
Belanja modal	1.185.735.851.757	21,39
Pembiayaan Daerah	361.362.143.394	6,52
SiLPA	383.362.143.394	6,91
Pengeluaran	22.000.000.000	0,40
Defisit	(361.362.143.394)	-6,52



UNIVERSITAS GADJAH MADA

THANK YOU

